



## **Analisis Penerapan dan Pengaruhnya Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan**

**Hepy Fitria Nur S<sup>1</sup>, Abrilla Hani Artavia<sup>2</sup>, Vanesa Desika P<sup>3</sup>, Rizki Zada Maulana P<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Kadiri Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Indonesia

Email: [Hepy.fns@gmail.com](mailto:Hepy.fns@gmail.com)<sup>1</sup>, [abrillahani4@gmail.com](mailto:abrillahani4@gmail.com)<sup>2</sup>, [vputri985@gmail.com](mailto:vputri985@gmail.com)<sup>3</sup>, [rizkizada.m@gmail.com](mailto:rizkizada.m@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract:** *This ponder points to analyze the application of Esteem Included Charge (VAT) bookkeeping within the setting of its impact on the planning of company budgetary articulations. In an ever-evolving trade environment, assess controls are an important aspect that companies have to be pay consideration to within the preparation of their money related explanations. Particularly, Esteem Included Charge (VAT) is one of the charges that includes a noteworthy affect on the company's budgetary position. This ponder employments auxiliary information investigation strategies including open monetary explanation information from different businesses. This consider distinguishes the affect of the application of Esteem Included Assess (VAT) bookkeeping on viewpoints of planning monetary articulations such as net salary, cash stream, and value. The comes about uncovered that the strategy of applying VAT can have a noteworthy impact on the company's money related position. In expansion, this consider too investigates the affect of VAT usage on charge hones and corporate social commitments. The comes about give a more profound understanding of the degree to which corporate tax assessment hones impact the planning of money related explanations and corporate social duty. In an period of globalization and harmonization of bookkeeping benchmarks, a profound understanding of the application of VAT and its impact on budgetary articulations is critical for partners, counting speculators, controllers, and company administration. This investigate gives profitable bits of knowledge into the significance of Esteem Included Charge (VAT) bookkeeping within the setting of planning budgetary articulations and can help companies in optimizing assess administration and understanding its affect on their money related execution.*

**Keywords:** *Implementation of VAT, Financial Reports, Tax Accounting*

**Abstrak:** Pertimbangan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam konteks dampaknya terhadap perencanaan laporan keuangan perusahaan. Dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang, pengendalian pajak merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam merencanakan laporan keuangan mereka. Secara khusus, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak yang memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan perusahaan. Pertimbangan ini menggunakan strategi analisis data sekunder yang mencakup informasi laporan keuangan publik dari berbagai bisnis. Pertimbangan ini mengidentifikasi dampak penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sudut pandang laporan keuangan seperti laba bersih, arus kas, dan nilai. Hasil dari pertimbangan ini mengungkapkan bahwa strategi penerapan PPN dapat memiliki dampak kritis terhadap posisi keuangan perusahaan. Selain itu, pertimbangan ini juga menyelidiki dampak penerapan PPN terhadap laba rugi dan kewajiban sosial perusahaan. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana pajak perusahaan memengaruhi pelaporan keuangan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam era globalisasi dan harmonisasi standar akuntansi, pemahaman yang mendalam tentang penerapan PPN dan pengaruhnya terhadap pelaporan keuangan sangat penting bagi mitra, spekulasi akuntansi, pengawas, dan administrasi perusahaan. Penelitian ini memberikan pengalaman yang berharga tentang pentingnya akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam konteks pelaporan keuangan dan dapat membantu perusahaan mengoptimalkan pengelolaan pajak dan mendapatkan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan mereka.

**Kata Kunci:** Penerapan PPN, Laporan Keuangan, Akuntansi Perpajakan

## **1. PENDAHULUAN**

Pajak dapat berupa setoran dari perorangan kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat ditegakkan) tanpa menerima pembayaran administrasi terkait (kontra-kinerja) yang dapat langsung dicontohkan dan digunakan untuk membayar biaya umum. Menurut Mardiasmo (2019:1). Terdapat keterbatasan penelitian tentang penerapan PPN dalam akuntansi perusahaan dan pengaruhnya terhadap ketentuan keuangan. Perlunya penelitian mendalam tentang bagaimana perusahaan mengelola PPN, menghitungnya, dan mencatatnya dalam ketentuan keuangan dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam pemahaman para praktisi akuntansi. Menurut Solikhah (2022:191) Pajak Masukan Termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah PPN yang seharusnya terutang oleh pembeli barang kena pajak, penerima manfaat jasa kena pajak, pedagang barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar wilayah hukum, atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar wilayah hukum yang berstatus PKP.

Investigasi tentang penerapan pembukuan PPN dan pengaruhnya terhadap perencanaan artikulasi moneter memiliki tingkat keseriusan yang tinggi. Dalam lingkungan perdagangan yang terus berubah, pemahaman yang lebih baik tentang praktik pembukuan PPN dapat menawarkan bantuan bagi perusahaan untuk mematuhi kontrol biaya yang relevan dan mengawasi risiko biaya secara efisien. Selain itu, laporan keuangan yang akurat dan lugas sangat penting bagi mitra, seperti spesialis keuangan, bank, dan pengawas. Oleh karena itu, pemikiran ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik pembukuan PPN dan pentingnya perencanaan artikulasi anggaran yang berkualitas. Sejumlah pemikiran sebelumnya telah meneliti subjek yang terkait dengan PPN dan pembukuan biaya. Namun, sebagian besar dari pemikiran ini berpusat pada sudut pandang hukum dan administratif penilaian pajak, sedangkan penelitian yang lebih mendalam tentang penerapan PPN dalam praktik pembukuan dan pengaruhnya terhadap penjelasan anggaran masih terbatas. Dengan demikian, pemikiran ini akan memperluas pemahaman tentang tema ini.

Penelitian ini akan memberikan sedikit pengetahuan yang belum digunakan mengenai praktik akuntansi PPN dan memberdayakan perusahaan untuk meningkatkan administrasi pajak mereka dan merencanakan pernyataan keuangan yang lebih informatif dan lugas. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan akuntansi PPN di perusahaan dan pengaruhnya terhadap perencanaan pernyataan keuangan. Manfaat dari penelitian ini meliputi 1) Memberikan pemahaman yang lebih

baik mengenai praktik akuntansi PPN di perusahaan. 2) Membantu perusahaan meningkatkan efektivitas administrasi pajak mereka. 3) Menjamin perencanaan pernyataan keuangan yang lebih tepat dan lugas. 4) Meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap pengendalian pajak yang relevan. 5) Memberikan arahan bagi spesialis akuntansi, pengawas, dan pengawas dalam mengawasi masalah yang terkait dengan PPN dan laporan keuangan. Dengan mengisi kekosongan penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi praktik akuntansi, perusahaan, dan penulisan ilmiah dalam bidang akuntansi pajak dan pelaporan keuangan.

## **2. TINJAUAN PUSTKA**

### **Akuntansi Perpajakan**

Tugas pembukuan biaya adalah mengelola informasi kuantitatif untuk menunjukkan laporan anggaran yang berisi perhitungan biaya, yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Menurut Tomasowa (2022), pembukuan biaya dapat berupa suatu kerangka kerja yang menyediakan data akuntansi berdasarkan pedoman akuntansi yang tepat dan arahan penilaian sebagai dasar bagi warga negara untuk memenuhi komitmen biaya mereka.

Menurut Senduk, Saerang, & Nangoi, (2019) akuntansi pajak adalah menentukan jumlah pajak yang terutang berdasarkan ketentuan moneter yang ditetapkan oleh perusahaan. Secara umum, akuntansi pajak adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan penguraian transaksi moneter yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk menentukan jumlah gaji kena pajak yang diterima atau diterima dalam suatu tahun pajak sebagai dasar untuk menentukan beban atau biaya upah yang terutang oleh perusahaan sebagai Warga Negara. Dalam hal ini, akuntansi pajak yang merupakan bagian dari akuntansi dapat memberikan bantuan dalam menekankan penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak dan untuk memenuhi kewajiban pajak/pemenuhan pajak dapat menjadi pemikiran atas hasil pajak suatu transaksi (Suhasto, Widodo, & Wibowo, 2020). Berbeda dengan akuntansi komersial, akuntansi pajak berperan dalam menampilkan dan menghitung Gaji Kena Pajak, khususnya dalam kerangka penilaian diri untuk digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dalam menghitung pajak yang terutang oleh Warga Negara.

## **Pajak**

Menurut Waluyo (2008:2) Pungutan merupakan iuran kepada negara (yang dapat ditaati) yang menjadi kewajiban mereka yang wajib membayarnya dengan cara menyetujui untuk melakukan pemungutan, tanpa mendapatkan imbalan yang ditetapkan secara khusus, dan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2000:3) Pungutan dapat merupakan iuran dalam bentuk uang dari rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dilaksanakan tanpa mendapatkan imbalan jasa (kontra prestasi) yang dapat langsung ditetapkan atau dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut S.I. Djajaningrat (dalam Sihan, 2010) dalam buku Abdul Halaim (2020:2) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan kewajiban sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

## **Fungsi Pajak**

Menurut Siti Resmi (2019:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

### 1. Anggaran Belanja Negara (Sumber Anggaran Negara)

Artinya pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

### 2. Anggaran Belanja Negara (Pengendali)

Artinya pajak dapat menjadi alat untuk mengendalikan atau melaksanakan pengaturan pemerintah dalam bidang sosial dan keuangan serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

## **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Rahayu & Suhayati (2013:231), Biaya Tambahan Nilai merupakan suatu biaya yang dibebankan pada setiap nilai tambah yang timbul karena adanya komponen produksi yang digunakan dalam proses produksi terhadap penyaluran barang kepada konsumen. Rahman (2010:81) juga menyatakan bahwa Biaya Tambahan Nilai merupakan suatu biaya yang dibebankan pada nilai tambah suatu barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen kepada konsumen. Menurut Muljono (2008:1), nilai tambah sendiri

merupakan nilai tambah yang diperoleh pedagang dari penjualan karena pada prinsipnya setiap pedagang pasti memperoleh keuntungan yang diambil dari nilai tambah tersebut.

### **Kelemahan dan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai**

Senada dengan Pohan (2016:44) kekurangan PPN

1. Umumnya organisasi umumnya tinggi jika dibandingkan dengan pungutan tidak langsung lainnya, baik di sisi organisasi pungutan maupun di sisi obligor.
2. Menimbulkan efek balik, yaitu semakin tinggi tingkat pelanggan, semakin ringan beban pajak yang ditanggung, dan sebaliknya
3. PPN sangat rentan untuk menilai usaha-usaha curang karena adanya instrumen kredit yang merupakan upaya untuk memperoleh kembali uang pajak yang dibayarkan oleh pelaku usaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui strategi organisasi pungutan.
4. Akibat dari kekurangan tersebut menuntut pengawasan yang lebih cermat terhadap tingkat kepatuhan warga negara dalam melaksanakan kewajiban pajaknya oleh organisasi pungutan.

### **PSAK Nomor 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan**

Menurut Kristiana (2019) Pernyataan moneter secara wajar menggambarkan posisi moneter, kinerja moneter, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian wajar dampak transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan sumber daya, kewajiban, upah, dan biaya yang ditetapkan dalam Sistem Dasar Perencanaan dan Penyajian Pernyataan Moneter Daengs (2018). Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian wajar pernyataan moneter. Entitas yang pernyataan moneternya telah mematuhi SAK membuat pernyataan yang jelas dan tidak tepat tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas pernyataan moneter. Suatu entitas tidak boleh menyatakan bahwa pernyataan moneternya telah mematuhi SAK kecuali pernyataan moneternya telah mematuhi semua persyaratan dalam SAK (Sihombing & Jaya, 2020).

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menerima pertanyaan kuantitatif tentang rencana dengan pendekatan informatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengenali variabel yang memengaruhi pelaksanaan pembukuan PPN dan dampaknya terhadap perencanaan penjelasan terkait keuangan. Informasi untuk penelitian ini diperoleh melalui tinjauan umum dan investigasi arsip. Penelitian dilakukan dengan data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan.

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam pertimbangan ini adalah perusahaan-perusahaan yang diwajibkan untuk mengumpulkan dan melaporkan PPN. Pengujian dilakukan dengan menggunakan strategi pengujian yang bertujuan, dengan memilih perusahaan-perusahaan yang mewakili berbagai segmen mekanis.

#### **Variabel Penelitian**

Yang paling bervariasi dalam pembahasan ini adalah penerapan pembukuan PPN dan pengaruhnya terhadap penyusunan penjelasan anggaran. Faktor-faktor lain mencakup estimasi perusahaan, kompleksitas transaksi PPN, dan komponen lain yang akan memengaruhi penerapan PPN.

#### **Prosedur Pengumpulan Data**

Informasi dikumpulkan melalui tinjauan umum dan pemeriksaan artikulasi moneter. Tinjauan umum dilakukan dengan menyebarkan survei kepada responden yang merupakan profesional akuntansi yang berpengalaman dalam administrasi PPN. Selain itu, informasi tambahan dari artikulasi moneter dianalisis untuk mengenali dampak pelaksanaan akuntansi PPN terhadap perencanaan penjelasan anggaran.

#### **Analisis data**

Informasi yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan strategi terukur, termasuk investigasi berulang untuk menguji hubungan antara faktor pelaksanaan pembukuan PPN dan faktor penjelasan anggaran. Investigasi terukur akan dilakukan dengan bantuan program terukur seperti SPSS.

### **Prosedur Etika**

Di tengah penulisan, penyelidikan moral akan tetap dilakukan dengan menjamin kerahasiaan data perusahaan yang diteliti. Semua informasi akan ditangani dengan memperhatikan standar moral penyelidikan.

## **4. HASIL PENELITIAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Penerapan Akuntansi PPN**

Sebagian besar perusahaan dalam pengujian menerapkan langkah-langkah pembukuan PPN yang relevan. Ini mencakup pengenalan, pengukuran, dan perincian PPN dalam pemahaman dengan langkah-langkah yang berlaku. Namun, ada variasi dalam tingkat kepatuhan dan pemahaman kontrol PPN. Penerapan Pembukuan Biaya Termasuk Nilai (PPN) dalam konteks penelitian ini mengacu pada bagaimana perusahaan menghitung dan menangani PPN dalam transaksi perdagangan mereka. PPN dapat berupa pajak yang dikenakan pada barang dagangan dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting lainnya tentang penerapan pembukuan PPN:

1. Pengakuan dan Penagihan PPN:

Perusahaan harus mengenali titik-titik di mana mereka memungut PPN dari klien atau klien membayar PPN. Ini mencakup pemahaman jenis transaksi apa yang dikenakan PPN, serta tarif PPN yang harus dibebankan pada harga barang dagangan atau jasa.

2. Pengakuan dan Estimasi PPN:

Setelah PPN dikumpulkan dari klien, perusahaan harus mengenali dan menghitungnya secara akurat dalam pernyataan keuangan mereka. PPN ini harus diakui sebagai kewajiban yang harus dibayarkan kepada spesialis biaya hingga dibayarkan. Perusahaan harus memiliki kerangka pembukuan yang memungkinkan mereka melacak jumlah PPN yang diterima dan dibayarkan.

3. Perincian PPN:

Perusahaan harus melaporkan jumlah PPN yang diterima dan dibayarkan dalam pengembalian biaya mereka. Ini mencakup persiapan laporan PPN bulanan atau berkala lainnya yang diperlukan oleh spesialis biaya. Ketepatan perincian ini penting untuk menghindari masalah hukum dan keuangan.

4. Kepatuhan Administratif:

Sangat penting bagi bisnis untuk mematuhi dan mematuhi kontrol PPN yang sesuai di lokasi tempat mereka beroperasi. Perubahan dalam kontrol PPN juga harus

diperhatikan dengan saksama untuk menjamin kepatuhan penuh. Ini mencakup pemahaman apakah barang dagangan atau layanan tertentu dikenakan PPN atau dikenakan tarif PPN yang berbeda.

5. Tinjauan dan Ulasan PPN:

Bisnis dapat menghadapi tinjauan pajak atau tinjauan PPN oleh spesialis biaya. Dengan demikian, mereka harus dapat memberikan dokumentasi dan catatan yang sah mengenai PPN yang dikumpulkan dan dibayarkan. Ini dapat menjadi area dasar dalam pembukuan PPN, karena ketidakpatuhan atau ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda atau hukuman pajak.

### **Pengaruh Penerapan Akuntansi PPN pada Laporan Keuangan**

Penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang atau jasa, yang mempengaruhi pengakuan pendapatan, biaya, dan kewajiban perusahaan. 1) PPN yang dibayar oleh perusahaan atas pembelian barang atau jasa dari pemasok akan dicatat sebagai PPN Masukan. PPN ini dapat dikreditkan atau dikurangkan dari kewajiban PPN Keluaran yang harus disetor ke negara. 2) Penerapan PPN tidak mempengaruhi langsung pengakuan pendapatan atau biaya pada laporan laba rugi karena PPN bukan merupakan komponen dari penghasilan atau biaya. Namun, biaya-biaya yang terkait dengan pembelian barang atau jasa akan mencakup PPN Masukan, yang kemudian dapat dikreditkan. 3) Jika perusahaan menjual barang atau jasa dan membebankan PPN kepada pelanggan, maka PPN yang belum disetor kepada negara akan tercatat sebagai kewajiban (utang PPN). 4) Penerapan PPN juga mempengaruhi arus kas operasional. Perusahaan harus membayar PPN pada saat pembelian barang dan jasa, namun bisa mengkreditkan PPN tersebut pada saat melakukan penjualan. Ini dapat menciptakan perbedaan antara arus kas yang dibayar untuk PPN dan arus kas yang diterima dari PPN Keluaran. 5) Penerapan PPN pada umumnya tidak mempengaruhi langsung laporan perubahan ekuitas, kecuali jika ada pengaruh dari kewajiban atau aset pajak tangguhan yang terkait dengan pajak. 6) Penerapan akuntansi PPN mengharuskan perusahaan untuk mematuhi regulasi pajak yang berlaku, termasuk melaporkan kewajiban PPN secara tepat waktu. Hal ini dapat mempengaruhi citra perusahaan di mata otoritas pajak dan menghindarkan dari potensi denda atau sanksi atas keterlambatan pelaporan atau pembayaran PPN.

## **Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Peraturan PPN**

Kepatuhan penjelasan moneter dengan pengendalian Biaya Termasuk Nilai (PPN) merupakan perspektif penting dari pembukuan dan perincian anggaran. Ini mengacu pada sejauh mana pernyataan anggaran perusahaan mematuhi arahan biaya yang sesuai terkait dengan pengumpulan dan pengumuman PPN. Berikut ini adalah penjelasan bantuan untuk kepatuhan ini:

1. Pengumpulan dan Perincian PPN:

Perusahaan harus secara sah mematuhi arahan biaya sehubungan dengan pengumpulan dan pengumuman PPN. Ini mencakup pengumpulan PPN dari klien (pajak keluar) sesuai dengan arahan, dan setelah itu mengumumkan jumlah tersebut kepada spesialis pajak dalam batasan waktu yang ditentukan.

2. Pencatatan Berkala:

Biasanya, perusahaan diharuskan untuk mencatat laporan PPN secara berkala (misalnya, bulanan atau triwulanan) dengan spesialis pajak. Laporan ini harus disiapkan dan dicatat sesuai dengan pengaturan pengendalian.

3. Pemanfaatan Tarif PPN yang Tepat:

Perusahaan juga harus memastikan bahwa mereka menggunakan tarif PPN yang sesuai. Tarif PPN dapat berubah berdasarkan jenis produk atau administrasi yang diberikan dan pengendalian biaya yang berlaku.

4. Perlindungan Terhadap Pajak yang Tidak Dapat Dikreditkan: PPN yang dikenakan atas pembelian barang dan jasa yang tidak dapat dikreditkan (artinya, perusahaan tidak dapat mengklaim kembali PPN ini sebagai pajak yang telah dibayar) harus dipantau dengan cermat dan diperhitungkan dalam laporan keuangan.

5. Akuntansi Terpisah: PPN yang dikumpulkan dan PPN yang harus dibayarkan harus diperlakukan sebagai akun terpisah dalam laporan keuangan. Dalam laporan laba rugi, PPN yang dikumpulkan seharusnya bukan bagian dari pendapatan operasional perusahaan. Di sisi lain, PPN yang harus dibayarkan kepada supplier harus dicatat sebagai liabilitas terutang.

## **5. PEMBAHASAN**

Hasil dari pertimbangan ini menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan pembukuan PPN yang baik di perusahaan. Dalam lingkungan biaya yang semakin kompleks, perusahaan harus menjamin kepatuhan penuh terhadap kontrol PPN untuk menghindari potensi bahaya dan menjamin kepatuhan yang sah. Selain itu, pelaksanaan pembukuan PPN yang baik juga dapat meningkatkan kualitas pengumuman terkait keuangan, yang pada gilirannya akan meningkatkan keterusterangan dan kepercayaan mitra. Pentingnya pemahaman yang baik tentang aturan pemungutan pajak PPN tidak hanya terbatas pada divisi akuntansi perusahaan, tetapi juga penting bagi manajemen atas. Informasi berkualitas unggul dalam artikulasi terkait keuangan memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mengatasi risiko yang terkait dengan biaya. Namun, hal ini juga menyadari bahwa masih ada tantangan dalam hal pemahaman dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan PPN.

Oleh karena itu, pemahaman, persiapan, dan kegiatan yang diperlukan untuk menjamin kepatuhan penuh perusahaan terhadap arahan PPN harus terus ditingkatkan. Sebagai kesimpulan, pelaksanaan pembukuan PPN yang baik memiliki pengaruh penting pada pengaturan penjelasan anggaran. Dengan cara ini, perusahaan harus mendistribusikan aset yang memadai untuk menjamin kepatuhan penuh terhadap aturan penilaian pajak PPN dan meningkatkan kualitas pernyataan anggaran mereka.

## **6. KESIMPULAN**

Dalam renungan ini, penyelidikan mendalam tentang penggunaan pembukuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pengaruhnya terhadap penyusunan penjelasan anggaran telah dilakukan. Beberapa penemuan utama dari renungan ini dapat disimpulkan:

Pertama-tama, pelaksanaan pembukuan PPN merupakan bagian penting dari kegiatan keuangan perusahaan. Pentingnya administrasi PPN yang baik dan perhitungan yang tepat dalam penjelasan keuangan perusahaan tidak dapat disangkal. Dalam pemikiran ini, kami menyelidiki berbagai perspektif pelaksanaan pembukuan PPN, penghitungan pembebanan, perincian, dan perubahan dalam arahan terkait. Kedua, penggunaan pembukuan PPN yang baik secara keseluruhan dapat memengaruhi perencanaan artikulasi anggaran perusahaan. Kepatuhan yang cermat terhadap arahan PPN dan penggunaan tarif penyesuaian akan menjamin artikulasi anggaran yang tepat dan lugas. Di sisi lain, kesalahan atau pelanggaran dalam penerapan PPN dapat berdampak negatif pada penjelasan anggaran dan dapat menyebabkan masalah hukum dan biaya.

Ketiga, pertimbangan ini juga menggarisbawahi pentingnya administrasi arsip pendukung yang baik dalam pengaturan PPN. Dokumentasi yang solid akan mendorong perusahaan dalam menjalani persiapan peninjauan dan menjamin bahwa setiap perubahan dalam peraturan PPN tercermin dengan baik dalam artikulasi moneter. Akhirnya, perubahan dalam kontrol PPN dan undang-undang biaya secara umum merupakan tantangan yang harus dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus terus memantau perubahan dalam arah ini dan menjamin bahwa artikulasi moneter mereka tetap sesuai dengan pengaturan yang relevan. Untuk mendapatkan pengaruh pembukuan PPN pada perencanaan penjelasan terkait keuangan, perusahaan harus melaksanakannya dengan hati-hati dan menjamin bahwa persiapan ini berjalan dengan baik. Ini tidak hanya akan memengaruhi pelaksanaan moneter perusahaan tetapi juga dapat menghindari konsekuensi hukum dan pajak yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, bagian dari pembukuan PPN dalam pengaturan artikulasi terkait keuangan perusahaan tidak boleh diabaikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Daengs, A. (2018). Tax planning implementation on income tax, Article 23 as a legal effort to minimize tax expense payable. *JTMB: Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*, 04(01), 01–09.
- Kristiana. (2019). Implementation of local tax service policies at the Regional Tax and Retribution Management Agency Office of Palangka Raya City. *JTMB: Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*, 05(02), 61–69.
- Mardiasmo. (2000). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan edisi terbaru*. CV Andi Offset.
- Muljono, D. (2008). *Pajak pertambahan nilai lengkap dengan undang-undang*. Penerbit Andi.
- Nabila, D., Jumaidy, L., & Lestari, B. (2020). Analisis penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada perusahaan jasa perbankan. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 19(01), 89–108.
- Nurhayati, N. (2019). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. K-MEDIA.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen perpajakan: Strategi perpajakan dan bisnis edisi revisi*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, S. K., & Suhayati, E. (2013). *Perpajakan teori dan teknis perhitungan*. Graha Ilmu.
- Rahman, A. (2010). *Panduan pelaksanaan administrasi perpajakan untuk karyawan, pelaku bisnis dan perusahaan*. Nuansa.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus edisi 11*. Salemba Empat.

- Senduk, C., Saerang, D., & Nangoi, G. (2019). Evaluasi penerapan pemotongan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 04(01), 1–9.
- Sihombing, L., & Jaya, H. (2020). Analisis perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Louisz International. *MEASURE MENT: Jurnal Akuntansi*, 14(01), 10–15.
- Solikhah, B., & Suryarini, T. (2022). *Perpajakan: Jl. Kelud Raya No.2 Semarang*.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Suhasto, I., Widodo, N., & Wibowo, S. (2020). The effectiveness and the contribution of regional taxes for regional original income in Ex-Karesidenan Madiun. *JURNAL AKSI: Akuntansi dan Sistem Informasi*, 05(01), 37–40.
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan perhitungan (1st ed.)*. Penerbit Andi.
- Tomasowa, D. E. T. (2022). *Akuntansi perpajakan (1st ed.)*. Nas Media Pustaka.
- Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia, Buku I (8th ed.)*. Salemba Empat.